



# **RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR TA. 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bekasi Tahun 2022 telah disusun tepat pada waktunya.

Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan SATPOL PP untuk tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2018-2023 serta mempedomani perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dalam rangka mewujudkan Visi “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.

Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SATPOL PP Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. Serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2023. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan evaluasi dan perbaikan selanjutnya.

Kami berharap semoga Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2023 dapat memberikan manfaat baik bagi seluruh aparatur SATPOL PP Kota Bekasi, maupun seluruh pihak terkait Pemerintah Kota Bekasi.

Bekasi, 25 September 2023

KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI



**KARTO S.IP, M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP.196704151986031005

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP .....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP .....	16
2.4. <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP</b> .....	<b>34</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP.....	34
3.3. Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP</b> .....	<b>40</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Bekasi dan Pencapaian Renstra Satpol PP Kota Bekasi s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) .....	10
Tabel 2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2023	19
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2023	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat sebagai salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib.

Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kota Bekasi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok memelihara ketentraman, ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi dari masing-masing organisasi perangkat daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil Renja SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum awalnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mempedomani Visi Misi, Program

Prioritas Wali Kota/Wakil Wali Kota Bekasi periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA,  
DAN IHSAN**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- 1.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota terpilih periode 2018-2023 penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum terdapat dalam Misi ke-5 (lima) yaitu **“Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”**.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyuluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah Kabupaten/Kota diharuskan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, setiap SKPD juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD sesuai ketentuan dalam pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengimplementasikan apa yang telah digariskan dalam RKPD guna meningkatkan pencapaian target kinerja pelayanan terhadap masyarakat dari tahun sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bekasi.

Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Bekasi disusun berpedoman kepada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 , Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
- 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 No.125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 ;
  - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
  - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Daerah Pasal 1 Ayat 3.
  - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  - 15) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
  - 16) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
  - 17) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 18) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023
  - 19) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
  - 20) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
  - 21) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.

- 22) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan perencanaan pembangunan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bekasi.

#### **B. Tujuan**

- 1) Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satpol PP yang telah disusun sebelumnya yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan;
- 2) Menciptakan sinergitas Perencanaan secara berkesinambungan antara berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan .

### **1.4 Sistematika**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) menggambarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

#### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Target indikator Kinerja Program Persentase rasio perlindungan masyarakat pada tahun 2021 target berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis sebesar 1 : 31, capaian target sampai triwulan IV sebesar 100% atau sesuai dengan target Renstra 1 : 31
2. Target Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 pada tahun 2021 sebesar 100 % tercapai sebesar 100%, hal ini berdasarkan data Jumlah pelanggaran pada tahun 2021 sebanyak 1531 dan penyelesaian pelanggaran K3 yang di tangani oleh Satpol PP sebesar 1531
3. Target indikator program kinerja persentase pelanggaran perda 1531, yang sudah ditangani dalam proses penyelesaian pelanggaran perda sebanyak 1531 kasus sehingga Satuan Polisi Pamong Praja menyelesaikan sebesar 100%.

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2021 Target indikator Kinerja berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis adalah Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100 %, tingkat capaian target sampai triwulan IV 100 %;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2021 dengan target indikator kinerja Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100 % tercapai sebesar 100%.

Berikut tabel tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2022, sebagai berikut :

**TABEL T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**(sumber LAKIP)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2022	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (th.2022)	Tingkat Capaian realisasi target renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%						
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik								

1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SAKIP, Laporan LPPD, Laporan LKPJ dan Laporan Kinerja Kepegawaian	0 dokumen	100,00%	100,00%			100		
		<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>							
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Keuangan Daerah</b>								
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS	3132 org/bulan	100,00%	100,00%			100		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD	jumlah laporan keuangan tahunan	0 dokumen	100,00%	100,00%			100		
		<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>							
	<b>Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik</b>	100%							
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	782 stel	100,00%	100,00%			100		

5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	20 org	100,00%	100,00%			100		
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 org	100,00%	100,00%			100		
		<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>							
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>							
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2098 unit	76,92%	100,00%			100,00%		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	84 unit	86,20%	100,00%			100,00%		
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	284 unit	86,20%	100,00%			100,00%		



10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat dan bahan pembersih	2342 unit	65,29%	100,00%			100,00%		
		jumlah alat tulis kantor	5106 unit							
		jumlah makanan dan minuman rapat dan harian pegawai	1567 pack							
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan	2298 unit	86,20%	100,00%			100,00%		
		jumlah penggandaan dokumen	68043 lembar							
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis surat kabar/majalah/buletin	39 eksemplar	86,20%	100,00%			100,00%		
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas dalam daerah	195 kali	86,20%	100,00%			100,00%		
		<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>							

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>							
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telepon, internet air dan listrik	108 rekening	100,00%	100,00%			100,00%		
15	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	6276 org/bulan	100,00%	100,00%			100,00%		
		jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	120 orang/bulan	100,00%	100,00%			100,00%		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>100%</b>							
16	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit	0,00%	100,00%			100,00%		

17	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	49 unit	0,00%	100,00%			100,00%		
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	263 unit	0,00%	100,00%			100,00%		
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas gedung kantor yang terpelihara	1681 unit	0,00%	100,00%			100,00%		
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		
		<b>Rasio Satlinmas Tiap Kelurahan</b>	<b>01.31</b>	<b>01.31</b>	<b>01.31</b>			<b>01.31</b>		
		<b>Presentase penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		
1	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>		

1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	jumlah kegiatan CFD	0 kali	100,00%	100,00%			100,00%			
		jumlah kegiatan HBN (Hari Besar Nasional dan Keagamaan)	25 kali								
		jumlah kegiatan unjuk rasa	36 kali								
2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	jumlah kegiatan Operasional K3	116 kegiatan	100,00%	100,00%			100,00%			
		jumlah kegiatan pekat	52 kegiatan								
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Rangkaian Kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas	1 kegiatan	100%	100,00%			100,00%			
		jumlah Rangkaian Kegiatan Jambore Satpol PP	0 kegiatan								
		<b>Rasio Satlinmas Tiap Kelurahan</b>	<b>01.31</b>	<b>01.31</b>	<b>01.31</b>			<b>01.31</b>			

4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah beras untuk anggota satlinmas	208320 kg	57,93%	100,00%			100,00%			
		jumlah honor anggota satlinmas	1736 orang								
		jumlah peserta sosialisasi pemeliharaan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	560 orang								
		<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>			
5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah anggota satlinmas peserta pelatihan penanggulangan bencana kebakaran	0	100,00%	100,00%			100,00%			
		jumlah peserta pelatihan penanggulangan huru hara	0	100,00%	100,00%			100,00%			

		jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	0	100,00%	100,00%			100,00%		
6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan diadakan	23 unit	100,00%	100,00%			100,00%		
		<b>Presentase penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Presentase penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	berkurangnya kasus pelanggaran perda	94 kali	100,00%	100,00%			100,00%		

---

1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	terselesaikannya kasus pelanggaran perda	88 kali	100,00%	100,00%			100,00%		
---	--	--	---------	---------	---------	--	--	---------	--	--

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan indikator Kinerja dan Target Pada Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Rasio perlindungan masyarakat 1 : 31, tercapai 1 : 31
2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 sebesar 100 %, tercapai 100 %
3. Persentase pelanggaran perda sebesar 100 % tercapai 100%

### **Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan Kondisi geografis wilayah kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan ibukota serta beberapa wilayah lain diantaranya kota Bogor, Depok dan Kabupaten Bekasi, mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan sosial dan ekonomi. Faktor strategis letak wilayah Kota Bekasi menarik para penduduk dari luar daerah untuk datang dan mencari mata pencarian di Kota Bekasi, tidak hanya sekedar bekerja sebagian bahkan kemudian menetap sehingga berdampak pada peningkatan kepadatan penduduk diwilayah Kota Bekasi.

Dalam kondisi tingginya jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan peluang lapangan pekerjaan ditambah kondisi ekonomi terdampak covid yang melemahkan dunia usaha sehingga banyak pelaku usaha yang menutup usahanya maka akan timbul para pengangguran baru yang secara otomatis akan mencari alternatif penghasilan untuk bertahan hidup. Apabila solusi alternatif untuk bertahan hidup itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan maka akan timbul masalah-masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kantrantibmas di wilayah kota Bekasi. Diantaranya banyaknya PKL liar, munculnya penyakit masyarakat seperti PSK, gelandangan, pengemis serta gangguan trantibum yang disebabkan



oleh maraknya perjudian, miras dan aksi sosial terkait pro kontra terhadap kebijakan penda sampai dengan konflik berlatar belakang keagamaan.

Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib terkait dengan berbagai gambaran kondisi diatas maka diperlukan suatu komitmen dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku serta dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Namun secara garis besar beberapa permasalahan yang menjadi isue penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban adalah :

1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah kuantitas, kualitas, kecepatan, ketepatan pelayanan ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
2. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat karena ketidakpahaman atau kurangnya sosialisasi terhadap Perda dan Perkada;
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP seperti Kendaraan Operasional yang memadai, Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Operasional Lapangan, Sumber Daya Manusia serta Sistem dan Strategi Penanganan Permasalahan Bidang Trantibum.

Untuk itu rekomendasi strategis yang dapat disampaikan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut antara lain :

1. Aspek regulasi, yaitu penguatan terhadap kapasitas kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan baik tingkat kota maupun kecamatan.

2. Aspek sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personil serta kualitas aparatur.
3. Aspek sarana dan prasarana yaitu terkait dengan kelengkapan aparatur maupun kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Aspek Pembiayaan yaitu terkait dengan anggaran pendukung operasional kegiatan maupun peningkatan kesejahteraan aparatur satpol pp.

#### 2.4 **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan Serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi skpd dalam menyempurnakan renja skpd untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama.

Persandingan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kota BeKasi**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai Kepmen 050-5889 Thn 2021)						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				117,533,782,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					92,112,731,370	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bekasi	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	80,173,282,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bekasi		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	43,427,025,280	

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	25 Dokumen	60,000,000	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	25 Dokumen	4,000,000	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	30,000,000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	2,000,000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	30,000,000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	2,000,000
				<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>						<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Presentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	39,284,235,000	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Presentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	37,282,058,000	
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	231 orang	39,184,235,000	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	231 orang	37,280,058,000	
	4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 laporan	50,000,000	4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bekasi	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 laporan	2,000,000	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	19 Laporan	50,000,000							

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

			<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>			
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Presentase Admnistrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>		<b>Presentase Admnistrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>500,000,000</b>
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1,500,000,000	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bekasi	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500,000,000
	7	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	100,000,000							
	8	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	100,000,000							
				<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>						<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	
<b>4</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,910,000,000</b>	<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>		<b>Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>680,917,400</b>

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	150,000,000	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	75,000,000	
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	350,000,000								
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	500,000,000								
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	350,000,000	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Bekasi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	316,996,400	
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	160,000,000	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	83,921,000	

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

	1 4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100,000,000	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	30,000,000	
							10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	50,000,000	
	1 5	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	300,000,000	11	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Bekasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	125,000,000	
				<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>						<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>		
<b>6</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34,369,047,000</b>	<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>		<b>Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,977,759,480</b>	



Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

	1 6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,000,000,000	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	850,000,000	
	1 7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	33,369,047,000	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2,127,759,480	
7	7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Presentase terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	2,850,000,000	<b>7.</b>	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>		<b>Presentase terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	1,982,290,400	
	1 8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	350,000,000	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	119,590,400	

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

	1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,800,000,000	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,499,700,000	
	1 5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200,000,000	16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	163,000,000	
	2 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	500,000,000	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bekasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	200,000,000	

II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kota Bekasi	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3</b>	100%	<b>37,360,500,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kota Bekasi		<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3</b>	100%	<b>48,685,706,090</b>	
8	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Bekasi	<b>Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>34,560,500,000</b>	<b>8 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>47,187,551,330</b>	
21	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Bekasi	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	47 kasus	910,000,000	18 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Bekasi	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	47 kasus	7,471,078,100	

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

	2 2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bekasi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	160 kasus	5,000,000,000	19	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bekasi	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	160 kasus	22,634,197,200	
	2 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  <b>Rasio Perlindungan Masyarakat</b>	12 Dokumen  <b>1:31</b>	800,000,000	24	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  <b>Rasio Perlindungan Masyarakat</b>	12 Dokumen  <b>1:31</b>	402,343,920	

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

	2 3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	20,650,500 ,000	25	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	15,590,033, 110	
				<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3</b>	<b>100%</b>						<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3</b>	<b>100%</b>		
	2 4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Bekasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	..oran g	800,000,00 0	21	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Bekasi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	..oran g	475,070,00 0	

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

			Jumlah anggota Satpol PP yang menerima penghargaan Satya Lencana dan karya bhakti						Jumlah anggota Satpol PP yang menerima penghargaan Satya Lencana dan karya bhakti				
	2 5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 dokumen	400,000,000	22	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 dokumen	76,775,000
	2 6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	23 unit	5,000,000,000	23	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	23 unit	433,054,000
2 9	2 7	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	20 Dokumen	500,000,000	25						

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

30	208	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kota Bekasi	Jumlah Masyarakat Terdampak penertiban perda dan perkada yang terlayani	15 laporan	500,000,000	26	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kota Bekasi	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Masyarakat Terdampak penertiban perda dan perkada yang terlayani	15 laporan	105,000,000
<b>9</b>		<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Prosentase Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>9.</b>	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Kota Bekasi</b>		<b>Prosentase Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>1,323,974,760</b>
	29	Sosiliasiasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 laporan	500,000,000	27	Sosiliasiasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 laporan	147,350,000
	30	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Bekasi	Jumlah monitoring dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	4 laporan	800,000,000	28	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan		Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah monitoring dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	4 laporan	1,014,174,760

Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

						Bupati/Walikota		Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
			jumlah laporan hasil monitoring									
	3 1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 laporan	1,000,000,000	29	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 laporan	162,450,000
<b>10</b>	<b>Pembinaan PPNS kabupaten/kota</b>	<b>Kota Bekasi</b>				<b>500,000,000</b>	<b>10</b>	<b>Pembinaan PPNS kabupaten/kota</b>				<b>174,180,000</b>



Rencana Kinerja (Renja) Akhir Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

	3 2	Pengembangan Karier PPNS	Kota Bek asi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 lapora n	500,000,00 0	30	Pengembang an Karier PPNS	Kota Bekas i	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraa n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 lapora n	174,180,00 0	
		<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>				<b>117,533,7 82,000</b>		<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>					<b>92,112,731 ,370</b>	

Arah pembangunan Kota Bekasi tahun 2023 menekankan pada pencapaian target atas sasaran – sasaran yang sudah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berharap menjadi Dinas yang diperhitungkan dengan permasalahan yang sangat mendasar dalam menciptakan, memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan alasan yang kuat antara lain :

1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, kecepatan, ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
2. Masih tingginya jumlah kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi perda dan perkara.
4. Masih tingginya unjuk rasa di Kota Bekasi dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak populis.
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP.
6. Semakin menjamurnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, di wilayah Kota Bekasi yang menimbulkan keresahan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang serius terutama penanganan pasca dilakukan penertiban atau operasi berupa penambahan frekwensi patroli rutin wilayah dan operasi cipta kondisi.
7. Permasalahan di daerah perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.
8. Daerah rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta gejolak sosial karena heterogenitas masyarakat Kota Bekasi yang mayoritas bukan penduduk tetap;
9. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;
10. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
11. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sejalan dengan perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dalam hal ini merupakan aspirasi langsung yang disampaikan dari masyarakat sebagai stake holder yang disampaikan melalui forum musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan. Usulan program dan kegiatan tersebut kemudian direkapitulasi dan dianalisis kembali oleh perangkat daerah dalam hal ini SKPD terkait dalam hal urgensi pelaksanaan, kesesuaian terhadap tupoksi SKPD dan ketersediaan anggaran. Hasil penelaahan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan proses tolak dan terima.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI**

##### **3.1 Telaahan Kebijakan Nasional**

Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum pemerintah kota Bekasi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui **Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi** yang mempunyai tugas pokok memelihara ketentraman, ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah, **Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi** dan Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam situasi yang kondusif

Tujuan dari Misi adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban. Tujuan ini diturunkan dalam sasaran operasional meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

##### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran yang dilakukan terhadap rumusan visi sebagai upaya penyederhanaan bagi pelaksanaan pencapaian visi melalui implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki keinginan kuat untuk mengimplementasikan Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2018 yaitu:

**“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA  
DAN IHSAN”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke 5 (*lima*) yakni “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman”

Untuk mewujudkan misi ke 5 pembangunan Kota Bekasi Periode 2018-2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai pada tahun 2023, sebagai berikut :

Atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menetapkan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

Tujuan	:	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator tujuan	:	Persentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada

Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Indikator Sasaran :	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 1. Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum
Sasaran 2 : Indikator Sasaran :	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan situasi dan kondisi tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial, beragama dan bermasyarakat dan dalam upaya untuk mencapai sasaran indikator kinerja utama tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun rencana program kerja kegiatan sebagai berikut :

#### A. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi

Dalam rangka menunjang prioritas pembangunan Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja turut berperan serta mewujudkan program prioritas pembangunan Kota Bekasi sebagai berikut :

- a. Pengembangan **“urban tourism”** untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
- b. Pengembangan **creative society** melalui penyelenggaraan *event* **“BEKASI CREATIVE”** di tingkat kota dan kecamatan.
- c. Pengembangan **Sistem Layanan Sosial Terpadu** (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
- d. Pengembangan **kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike)**;
- e. Penambahan dan pemeliharaan **taman-taman kota bernuansa tema tertentu** (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);
- f. Penataan dan pengendalian **estetika papan reklame** (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
- g. **Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi** untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;
- h. Penanggulangan banjir melalui penerapan **penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage)**;
- i. Pengelolaan event **“car free day”** yang berkontribusi terhadap **promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan**;

B. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Belanja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 2 (dua) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 29 (Dua puluh Sembilan) Sub Kegiatan, Jumlah Pagu Rp.**92,817,098,905,-** (Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belah Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima rupiah ) dengan rincian sebagai berikut

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri dari :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Awal Tahun

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatana
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
  - 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum



- b. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
  - d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
  - f. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - b. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  - c. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Pengembangan Karier PPNS kabupaten/kota

#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2018 yaitu:

#### **“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota terpilih periode 2018-2023 penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum terdapat dalam Misi ke-5 (lima) yaitu **“Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”**.

Dalam rangka turut mewujudkan prioritas pembangunan kota bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja turut menunjang program prioritas pembangunan kota bekasi dalam hal memelihara Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, sebagai berikut :

- a. Pengembangan **“urban tourism”** untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
- b. Pengembangan **creative society** melalui penyelenggaraan *event* **“BEKASI CREATIVE”** di tingkat kota dan kecamatan.
- c. Pengembangan **Sistem Layanan Sosial Terpadu** (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);

- d. Pengembangan **kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*)**;
- e. Penambahan dan pemeliharaan **taman-taman kota bernuansa tema tertentu** (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);
- f. Penataan dan pengendalian **estetika papan reklame** (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
- g. **Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi** untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;
- h. Penanggulangan banjir melalui penerapan **penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*)**;
- i. Pengelolaan event **“car free day”** yang berkontribusi terhadap **promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan**;

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mempunyai tugas menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
5. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Satpol PP guna melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki rencana kerja tahun 2023 hasil desk dengan total pagu sebesar Rp. **92.112.731.370,-** (Sembilan puluh dua milyar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah ) dengan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir).

T.C 33  
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
KOTA BEKASI

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Capaian		Kinerja	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting		
		Program	Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	
-1	-2	-3		-3			-4	-5	-6	-7	-8	
<b>VISI : KOTA BEKASI CERDAS, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN</b>												
<b>MISI : 1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;</b>												
<b>TUJUAN : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>												
<b>INDIKATOR TUJUAN : Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada</b>												
<b>SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP</b>												
<b>1. Nilai AKIP</b>												
<b>2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>												
1	5				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
1	5				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						92,112,731,370	
1	5	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						43,427,025,280	
1	5	1	8	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						4,000,000	

Rencana Kinerja (Renja) Awal Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1	5	1	8	1	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	20 Dokumen	2,000,000	PAD		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	16 laporan	2,000,000			
1	5	1	8	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>37,282,058,000</b>		
1	5	1	8	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	231 orang	37,280,058,000	PAD		
1	5	1	8	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Awal Tahun	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	16 laporan	2,000,000	PAD		
1	5	1	8	5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>500,000,000</b>		

Rencana Kinerja (Renja) Awal Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1	5	1	8	5	9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Administrasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	1 paket	500,000,000				
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>680,917,400</b>		
1	5	1	8	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	1 paket	75,000,000	PAD			
1	5	1	8	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	4 paket	316,996,400	PAD			
1	5	1	8	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	1 paket	83,921,000	PAD			
1	5	1	8	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	1 Dokumen	30,000,000	PAD			
1	5	1	8	6	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	12 laporan	50,000,000	PAD			
1	5	1	8	6	9	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	25 laporan	125,000,000	PAD			

Rencana Kinerja (Renja) Awal Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>2,977,759,480</b>				
1	5	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	803 laporan	850,000,000		
1	5	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	432 laporan	2,127,759,480		
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,982,290,400</b>				
1	5	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	6 unit	119,590,400	PAD	
	5	1	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	52 unit	1,499,700,000	PAD	



Rencana Kinerja (Renja) Awal Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1	5	1	1	9	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	197 unit	163,000,000	PAD			
1	5	1	1	9	4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkanya akuntabilitas kinerja Satpol	Kota Bekasi	1 unit	200,000,000	PAD			
1	5	1	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										<b>48,685,706,090</b>		
1	5	1	2	2		<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>47,187,551,330</b>		
1	5	1	2	2	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	7,471,078,100	PAD			

Rencana Kinerja (Renja) Awal Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1	5	1	2	2	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	22,634,197,200	PAD
1	5	1	2	2	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	402,343,920	PAD
1	5	1	2	2	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	1.31	15,590,033,110	PAD

Rencana Kinerja (Renja) Awal Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1	5	1	2	2	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	475,070,000	PAD
2	5	1	2	2	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	76,775,000	PAD
1	5	1	2	2	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	433,054,000	PAD
1	5	1	2	2	9	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Prosentase penyelesaian pelanggaran K3	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Masyarakat Terdampak penertiban perda dan perkara yang terlayani	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	105,000,000	PAD
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>									

Rencana Kinerja (Renja) Awal Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

												<b>1,323,974,760</b>					
1	5	2	2	2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	147,350,000			
1	5	2	2	2	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah monitoring dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	1,014,174,760	PAD		
1	5	2	2	2	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	100%	162,450,000	PAD		
1	5	2	2	3	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>							<b>Pembinaan PPNS kabupaten/kota</b>			<b>174,180,000</b>		

Rencana Kinerja (Renja) Awal Tahun Anggaran 2023  
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1	5	2	2	3	1	Pengembangan Karier PPNS	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kota Bekasi	90%	174,180,000	PAD
						<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>								<b>92,112,731,370</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi program dan kegiatannya.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi para stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Ruang lingkup perencanaan penegakan Perda dan menciptakan ketertiban serta keamanan di Kota Bekasi ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kota Bekasi secara keseluruhan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan awal organisasi. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas upaya penyamaan persepsi melalui komunikasi, koordinasi dan konsolidasi internal mutlak diperlukan sehingga pencapaian target kinerja bukan hanya menjaditanggung jawab Kepala SKPD selaku pimpinan satpol PP melainkan seluruh jajaran pemangku jabatan di setiap bidang serta staf yang ada dibawahnya.

Segala kekurangan diharapkan selalu menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk selanjutnya guna mencapai hasil yang maksimal.

Bekasi, 2022

KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

**Drs. ABI HURAIRAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP.19660103 198603 1 012